

INDIVIDUALISME DAN LIBERALISME DALAM SEKULARISME MEDIA AMERIKA

Alia Azmi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email : azmialia@gmail.com

Abstract

Liberal thoughts argue that men have rational and logical ability to decide the rightest and best choice for themselves, which means that men are autonomous in determining their life's orientation and truth. Therefore men cannot be forced to accept certain general truth from the society because each person have distinguished goal, which is incommensurable. The single interpretation of truth is considered incompatible with human ability to contemplate their objectives. This makes the basis of the secular practice in American society; the separation of church (religion) and state, where religion is considered private matters. The amendment of the constitution clearly notes that state should not make any law respecting or against practice of any religion. This practice can be seen in the American mass media, where most hold liberal view and shun away from religious debates. Media as a public sphere play an important role in facilitating the debate about discourses, therefore refrain from private matters such as religion.

Key words: *liberal self-determinism, secularism, American media*

Pendahuluan

Liberalisme menempati posisi sentral dalam menjelaskan tujuan akhir individu dan pencarian kebenaran moral. Pemikir liberal percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan rasio dan logika untuk menentukan hal-hal yang benar dan terbaik baginya. Kemampuan manusia tersebut otonom dan terlepas dari nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh kekuatan yang lebih besar seperti penguasa maupun kepercayaan spiritual tertentu. Penteori liberal seperti Isiah Berlin, John Rawls, dan Robert Nozick mengemukakan pandangan bahwa manusia adalah makhluk otonom yang dapat menentukan sendiri arah dan tujuan kebenaran hidupnya.

Salah satu bahasan penting dalam otonomi individu ini adalah konsep kebebasan positif dan negatif yang dikemukakan oleh Isiah Berlin. Walaupun pembedaan kebebasan yang positif dan negatif ini dapat ditelusuri hingga Kant dan Rosseau, Isiah Berlinlah yang mengartikulasi pendapat ini lebih jauh dalam esainya *Two Concepts of Liberty*. Pengertian negatif kebebasan adalah keadaan di mana manusia dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada pembatasan dan campur tangan dari

pihak luar, termasuk pemerintah atau kelompok penguasa (Berlin, 2004: 233). Sedangkan pengertian positif kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan sendiri nasib dan tujuan hidupnya, karena manusia merupakan makhluk rasional yang otonomi dan dapat memilih keputusan yang terbaik bagi dirinya. Kemampuan rasio manusia ini merupakan hal penting yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain, dan hanya dengan kebebasan manusia dapat mengimplementasikan sepenuhnya kelebihanannya tersebut. (Berlin, 2004: 244).

Maka, sesuai dengan tradisi liberal, manusia seharusnya tidak dipaksa untuk menerima suatu kebenaran moral yang digeneralisasi di tengah-tengah masyarakat, karena setiap manusia mempunyai keinginan dan tujuan yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain (*incommensurable*). Dengan demikian, Berlin lebih menekankan pada pentingnya kebebasan individu dan pengakuan terhadap pluralisme masyarakat daripada bentuk kolektivisme maupun komunitarian.

Hak otonom dikemukakan oleh penteori liberal lain seperti John Rawls, yang menyatakan bahwa kebebasan pada dasarnya dapat dijelaskan dengan merujuk pada tiga hal,

Individualisme dan Liberalisme...

yaitu agen yang bebas, restriksi atau pembatasan yang tidak boleh dikenakan pada agen tersebut, dan hal-hal apa saja yang bebas dan tidak bebas mereka lakukan (Rawls, 1971: 177). Dalam hal ini, Rawls memiliki pandangan negatif klasik tentang kebebasan yang hampir sama dengan penteoris klasik seperti Mill dan Rousseau. Ia juga mengakui tidak mengindahkan perdebatan pengertian positif dan negatif kebebasan, karena menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak esensial dan tidak perlu dalam pengertian kebebasan.

Namun pemikiran yang paling penting dalam tesis Rawls bukanlah mengenai tiga rujukan tersebut, melainkan pendapatnya mengenai keadilan, dalam keadaan mana kebebasan dapat terpenuhi. Dalam teorinya tentang keadilan, Rawls menjelaskan bahwa prinsip kebebasan meliputi kebebasan yang sama bagi semua orang, yang hanya dapat dikorbankan apabila diyakini akan bermanfaat bagi kebaikan semua orang dan akan meningkatkan kualitas kebebasan itu sendiri, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan nasional (dalam Shapiro, 2006: 221). Prinsip ini merupakan pilihan yang paling rasional dipilih oleh individu dalam keadaan awal hipotetis Rawls yaitu berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).

Individu-individu hipotetis yang berada dalam selubung ketidaktahuan tersebut haruslah bebas dari fakta-fakta khusus tentang diri mereka, termasuk posisi dalam masyarakat, kelas ekonomi, status sosial, bakat, kemampuan, dan ciri-ciri psikologis (Shapiro, 2006: 223). Kebebasan dari fakta-fakta ini akan membuat individu-individu tersebut mempunyai pendapat yang sama tentang keadilan, bahwa setiap orang harus mendapatkan kebebasan yang sama besar. Sebaliknya, pengetahuan individu tentang orang-orang yang akan mendapatkan pembagian kebebasan akan berakibat pada kesimpulan lain yang tidak sesuai dengan persetujuan mengenai konsensus keadilan tadi.

Tradisi libertarian seperti pandangan Robert Nozick juga mengemukakan bentuk keadaan hipotetis untuk menjelaskan bagaimana pilihan kebebasanlah yang paling mungkin diambil semua individu. Menurut Nozick, individu dalam keadaan alamiah Locke akan memilih bentuk negara minimal, atau “negara anjing penjaga” yang hanya bertugas melindungi warga dari kejahatan seperti kekerasan,

pencurian, penipuan, dan menegakkan kontrak. Konsep negara minimal seperti ini akan mendapat persetujuan dari setiap individu karena tidak melanggar hak individu dan wilayah pribadi. Sebuah lembaga politik yang mungkin akan mencampuri urusan pribadi atau membatasi hak individu harus mendapat persetujuan dari semua individu (Shapiro, 2006: 163-4).

Keadaan alamiah yang dimaksudkan Nozick adalah situasi di mana “individu pada umumnya menaati aturan moral dan umumnya bertingkah laku sebagaimana seharusnya” (Shapiro, 2006: 165). Kondisi seperti ini memungkinkan untuk tidak adanya pemerintahan yang dapat membatasi hak-hak individu. Walaupun dapat mengacu pada berbagai bidang kehidupan, penjelasan Nozick ini banyak berkisar pada kegiatan ekonomi; bahwa masyarakat dalam sistem libertarian negatif mempunyai pembagian kerja berdasarkan pasar, uang, wirausahawan, dan kegiatan usaha sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan dalam mengatur perekonomian.

Mengenai pengertian negatif kebebasan yang dikemukakan Nozick, ia menggarisbawahi aturan yang sangat ketat tentang hak individu. Menurutnya wilayah pribadi individu adalah eksklusif dan tidak boleh dilanggar tanpa sepengetahuannya. Ia menggambarkan hak sebagai garis dalam wilayah moral yang mengelilingi individu, yang tidak boleh disentuh dalam keadaan apa pun tanpa persetujuan individu bersangkutan (Shapiro, 2006: 169). Dengan keadaan ini, kita dapat saja menduga individu-individu ini adalah yang paling egois dan individualis, tetapi menurut Nozick keadaan seperti itu dan penerapan negara minimal akan membentuk masyarakat yang paling baik dan paling mendekati utopia (Shapiro, 2006: 165).

Berbagai pandangan individualisme liberal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu mutlak menjadi sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini juga berlaku dalam hal penentuan kebenaran, di mana individu berhak untuk menentukan hal yang terbaik baginya, dan penilaiannya itu harus bebas dari paksaan pihak lain maupun doktrin-doktrin yang beredar di lingkungan sekitarnya. Penilaian individu haruslah objektif dan netral, serta terbebas dari nilai-nilai kelompok, terutama yang bersifat paksaan.

Filsuf liberalis pada umumnya juga membahas tentang pluralisme maupun interaksi

antara individu-individu maupun kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini perlu karena pada dasarnya manusia menyadari bahwa kebebasan dapat menimbulkan masalah ketika berbenturan dengan hak kebebasan ataupun kepentingan individu/kelompok lain. Oleh sebab itu para liberalis sering berargumen mengenai perlunya tatanan politik liberal yang memberi perhatian besar pada pluralisme.

Setiap individu harusnya dipercaya untuk memilih nilai-nilai sendiri sesuai dengan otonomi mereka, dan dihindari dari penekanan pemilihan kebenaran yang ditentukan oleh orang lain. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Berlin memusatkan perhatian pada kelemahan pengertian positif kebebasan yang dapat mengakibatkan penguasa atau sekelompok kecil elit menanamkan pandangan moralnya terhadap orang lain. Bagi Berlin, nilai-nilai moral setiap individu adalah *incommensurable*, yaitu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. John Gray menganalogikan pandangan Berlin ini dengan selera seni, seperti sastra karya Shakespeare yang tidak bisa dibandingkan dengan karya klasik Perancis Corneille dan Racine. Pandangan Berlin tentang etika sesuai dengan analogi ini, seperti aliran-aliran dalam kesenian yang tidak dapat diukur perbandingannya (Gray, 1993: 65).

Pluralisme yang digambarkan tersebut memberikan kebebasan pada masing-masing individu untuk mempunyai nilai yang sesuai dengan kemauan dan hati nuraninya. Sudut pandang ini lebih bersifat netral dalam mengakui penilaian individu yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan orang lain. Netral dalam hal ini berarti politik yang menoleransi perbedaan, seperti yang diungkapkan oleh Rawls. Negara liberal tidak berpihak pada salah

satu agama dalam menjawab sebuah pertanyaan kebenaran, sehingga aturan tentang kebenaran moral dan arah sikap perilaku tidak akan ditentukan oleh hukum negara, seperti Mahkamah Agung di Amerika tidak pernah memutuskan bagaimana cara meminta pengampunan spiritual (Owen, 2001: 129).

Pluralisme paling jelas dilihat dalam posisi pemerintah dalam menghadapi masyarakat majemuk seperti di Amerika Serikat. Kelompok-kelompok di Amerika semakin beragam sebagai akibat dari posisinya yang merupakan negara tujuan imigrasi. Salah satu bentuk kemajemukannya adalah dari segi pemeluk agama. Walaupun masih didominasi pemeluk Protestan, jumlah pemeluk agama lain semakin bertambah. Akan tetapi, dari awal berdirinya pun Amerika telah menerapkan pluralisme dalam hal agama yaitu dengan pemisahan yang tegas antara gereja dan negara. Amerika merupakan pengejawantahan negara liberal yang disebutkan Rawls, yaitu negara yang tidak memihak pada satu agama dalam menentukan kebenaran moral, karena agama berada di luar lingkup penentuan kebenaran, yang diserahkan pada hukum sekuler negara.

Sekularisme: Hubungan Negara dengan Agama dari Pandangan Liberal

Hubungan negara dengan agama telah menjadi perdebatan penting dalam filsafat politik, termasuk dalam sistem pemerintahan sekuler seperti Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Peningkatan jumlah umat beragama dan kelompok-kelompok agama baru pun menambah perhatian masyarakat dan akademis dalam menemukan susunan terbaik untuk memfasilitasi keberagaman umat beragama dalam masyarakat.

Tabel 1. Tipologi Kebijakan dan Institusional Hubungan Negara dan Agama

	<i>Constitutional</i>	<i>Legal</i>	<i>Administrative</i>	<i>Political</i>	<i>Cultural</i>
<i>Monism</i>	<i>Strong establishment</i>	<i>Legal monism</i>	<i>Administrative monism</i>	<i>Political monism</i>	<i>Religiously monistic nation</i>
<i>Institutional pluralism</i>	<i>Weak establishment</i>	<i>Legal monism</i>	<i>Some administrative pluralism</i>	<i>Restricted political pluralism</i>	<i>Hesitant religious pluralization of nation</i>
	<i>Plural establishment</i>	<i>Legal pluralism</i>	<i>Administrative pluralism</i>	<i>Political pluralism</i>	<i>Recognized religious pluralism</i>
	<i>Non-constitutional pluralism</i>	<i>Restricted legal pluralism</i>	<i>Administrative pluralism</i>	<i>Political pluralism</i>	<i>Recognized religious pluralism</i>
<i>Strict separationist</i>	<i>Non-establishment and private pluralism</i>	<i>Strict legal separation</i>	<i>Strict administrative separation (intended)</i>	<i>Strict political separation (intended)</i>	<i>None of the state business</i>

Sumber: Bader, 2003: 67

Individualisme dan Liberalisme...

Para sosiolog membagi beberapa pandangan mengenai hubungan negara dengan agama ke dalam beberapa kategori. Sosiolog dan filsuf politik Veit Bader (2003: 67) membagi bentuk kebijakan politik dan institusional dalam hubungan negara dan agama ke dalam lima kategori, yaitu monisme (*strong establishment*); pluralisme institusional yang terbagi lagi menjadi tiga bentuk yaitu *weak establishment*, pluralisme konstitusional (*plural establishment*), dan *non-constitutional pluralism*; serta pemisahan tegas (*non-establishment and private pluralism*). Pemikir lain seperti Carl Esbeck (1985:375-6) membagi kategori hubungan negara dengan agama ke dalam lima pandangan, yaitu pemisahan tegas, pemisahan pluralistis (*pluralistic separationist*), pemisahan institusional (*institutional separationist*), *nonpreferentialist*, dan *restorationist*.

Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar, kategori hubungan negara dengan agama dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu pemisahan yang tegas (*strict separationist*), pluralisme institusional, dan monisme. Pemisahan yang kaku mengacu pada pemisahan tegas negara dengan agama seperti yang diungkapkan oleh Thomas Jefferson "*separation of church and state*", bahwa negara tidak ikut campur dalam pilihan agama masing-masing individu, namun individu berhak untuk memeluk agama dan beribadah. Monisme berarti mengakui suatu agama sebagai agama negara, sehingga agama tersebut secara legal menjadi dasar konstitusi bagi negara tersebut. Pluralisme institusional berarti mengakui kebebasan dan keberagaman agama dalam masyarakat, yang mana pilihan-pilihan ini dilindungi oleh institusi pemerintah yang tidak terikat dengan satu agama tertentu. Bentuk dan pelaksanaan pluralisme institusional ini biasanya bervariasi, mulai dari adanya pengaruh nilai-nilai agama terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan untuk menjaga ketertiban masyarakat, hingga adanya pengakuan yang jelas oleh negara terhadap sebuah atau beberapa agama dan bahkan pemberian hak-hak khusus terhadap organisasi-organisasi agama (Bader, 2003, Esbeck, 1985).

Pemisahan yang tegas (*strict separationist*) masih menjadi pilihan utama bagi golongan liberal. Di negara demokrasi liberal, pemerintah tidak ikut campur dalam kehidupan beragama dan tidak dipengaruhi oleh

agama dalam pembuatan kebijakan dan peraturan hukum. Pilihan untuk memeluk agama dan beribadah sepenuhnya diserahkan kepada individu, dan bukan merupakan urusan pemerintah. Dengan cara ini, pluralisme dijaga dalam masyarakat karena setiap individu menghargai kebebasan orang lain untuk beragama.

Pemisahan yang tegas inilah yang dilihat sebagai sekularisasi, yaitu transformasi orang, kantor, properti, institusi, atau masalah-masalah eklesiastis atau karakter spiritual ke dalam posisi keduniaan (Berkes, 1998: 5). Dengan melihat istilahnya, sekularisasi merupakan proses di mana manusia mulai memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan duniawi yang rasional, sehingga budaya dan tradisi agama menjadi suatu identitas pribadi yang relatif dan tidak berkaitan dengan domain publik yang rasional. Pada perkembangannya, sekularisasi menjadi paham sekularisme yang dominan dalam gaya hidup masyarakat Amerika.

Pemisahan Negara dan Agama dalam Masyarakat Amerika

Menurut Pemisahan negara dan agama terutama sekali dapat dilihat dengan jelas dalam pemerintahan Amerika dan hukum yang mengaturnya. Walaupun tidak disebutkan dalam Konstitusi Amerika, Amandemen Pertama Konstitusi yang diadopsi pada tahun 1791 memuat konsep kebebasan beragama dengan pernyataan "*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof...*" yang berarti pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan menyangkut agama tertentu, dan melindungi hak masyarakat dalam kebebasan beragama. Pernyataan ini kemudian dikutip oleh Presiden Thomas Jefferson dalam suratnya kepada Danbury Baptist Association untuk mengingatkan mereka akan pemisahan negara dan agama di Amerika; "...*I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should 'make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,' thus building a wall of separation between Church & State.*" Pernyataan "*wall of separation between church and state*" menjadi terkenal dan sering dikutip dalam pengadilan dalam memutuskan kasus yang berhubungan dengan masalah agama (Hamburger, 2002: 1). Pernyataan tersebut telah

menjadi pandangan umum dalam penyelesaian masalah agama di Amerika. Pengakuan terhadap hak berbicara, otonomi personal, kebebasan asosiatif, dan hak kepemilikan mencakup dan menjamin kebebasan warga negara untuk beragama dan tumbuhnya berbagai kelompok agama dalam masyarakat. Bentuk-bentuk pengakuan ini merepresentasikan kesetaraan kebebasan yang menjamin seseorang tidak direndahkan sebagai akibat dari tindakan dan kegiatannya dalam hal religius (Eisgruber & Sager, 2007: 4). Dengan demikian, kebebasan beragama di Amerika hingga saat ini sering digambarkan dengan “dinding pemisahan gereja dengan negara”.

Pandangan pemisahan gereja dengan agama ini, walaupun dipopulerkan oleh Jefferson, bermula dari prinsip yang diajukan oleh Roger Williams pada abad ke-17, sebagai bagian dari penduduk imigran awal Amerika (*early settlers*) yang masih mengingat dengan jelas konflik dan masalah yang agama yang menyebabkan perpecahan di daratan Eropa, yang sebagian besar berpandangan bahwa pemisahan agama dengan negara sangat penting. Williams bahkan memiliki pandangan lebih jauh mengenai pemisahan, yaitu bahwa suatu gereja tidak hanya terpisah dari gereja nasional manapun, baik yang berada di Massachusetts maupun kerajaan Inggris, tetapi juga anggota jemaat tersebut harus bebas dari bentuk ketidakmurnian (*purity*) ajaran dari berbagai kelompok jemaat. Williams menganggap bahwa kekuasaan gereja nasional dapat memengaruhi ajaran suatu jemaat dan berakibat pada ketidakmurnian ajaran tersebut. Bagi Williams, individu harus bebas beragama tanpa harus dicampuri oleh kekuasaan pemerintah sipil, karena ia percaya bahwa pemerintah tidak mempunyai otoritas terhadap masalah spiritual (Hamburger, 2002: 39-42). Dalam pandangan Williams ini telah terlihat pemisahan antara masalah spiritual dengan keduniawian yang menjadi landasan pandangan kebebasan beragamanya yang juga menjadi landasan penting bagi sekularisme Amerika.

Bagi masyarakat Amerika, agama merupakan hal pribadi yang jarang dibahas dalam domain publik. Agama merupakan urusan individu dengan Tuhannya, dan negara harus memfasilitasi hal tersebut dengan tidak campur tangan dalam masalah keagamaan; negara tidak berpihak pada agama tertentu, tetapi juga tidak melarang warga negaranya untuk memilih suatu

agama dan beribadah. Opresi dan penekanan terhadap masyarakat dari penguasa didasarkan pada pembenaran nilai-nilai agama seperti Eropa di masa lampau merupakan pengalaman yang harus dihindari. Di sisi lain, masyarakat Amerika juga tidak ingin mengikuti pengalaman negara-negara komunis totaliter yang mendorong ateisme dan mengutamakan larangan beragama yang menyebabkan dinomorduakannya penganut agama dalam masyarakat (Trigg, 2007: 10-12).

Untuk menjelaskan pemisahan agama dengan negara ini, Trigg mengontraskan antara agama dengan akal (*faith and reason*) dalam kehidupan; dalam pandangan umum, agama hanya untuk mencari makna dalam kehidupan pribadi, sedangkan akal dapat digunakan untuk mencari kebenaran yang universal. Hal ini disebabkan oleh pengaruh “relativism”, yaitu bahwa tidak ada kebenaran yang dapat dicari dari berbagai agama, karena agama terlalu subjektif (Trigg: 4). Trigg mengutip pendapat Robert Audi tentang perlunya memisahkan nilai-nilai agama dari publik, dengan kata lain perlu adanya bidang “sekuler” dalam masyarakat yang mengatur nilai-nilai kebenaran bersama. Dalam hal ini, rasionalitas harus berperan penting dalam menentukan kebenaran, karena pengaruh nilai-nilai agama yang berbeda tidak akan menimbulkan satu kesepakatan (Trigg: 36).

Pemisahan bidang “sekuler” dan keagamaan terutama sekali penting dalam masyarakat majemuk. Masyarakat yang heterogen, terutama dalam hal agama, cenderung jatuh dalam konflik yang berkepanjangan, apabila tidak ada unsur sekularisme. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sangat penting untuk membawanya ke dalam arena sekuler, karena apabila semua masalah kehidupan dipandang dari nilai-nilai agama, maka tidak akan ada kesamaan pendapat di antara masyarakat (Yinger, 1967: 26-7).

Pada perkembangannya, sekularisme tidak hanya merupakan sebuah proses ataupun bentuk pemerintahan yang harus terpisah dari campur tangan agama dan sebaliknya. Perkembangan modernisasi dan ilmu pengetahuan telah membuat masyarakat Barat memarginalisasi agama, karena agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional dan sangat relatif, sehingga berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang serba pasti dan rasional. Graeme Smith menggambarkan

Individualisme dan Liberalisme...

sekularisme dalam masyarakat dapat dilihat dalam tiga fenomena yaitu:

- a. Signifikansi organisasi dan institusi Kristen menurun. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah orang yang ke gereja dan menjadi anggota jemaat. Selain itu, penghormatan terhadap status keagamaan juga menurun, di mana pemimpin-pemimpin agama sudah jarang dimintai pendapat tentang masalah publik. Media pun menempatkan pendapat para pemimpin tersebut tentang masalah-masalah umum seperti perang, kemiskinan, dan konflik hanya sebagai domain pribadi.
- b. Sekularisme semakin terlihat dalam forum publik, termasuk pembicaraan di media, sekolah, dan universitas, dan antara rekan kerja dan dalam keluarga. Agama dianggap sebagai pandangan pribadi, dan bukan kebenaran publik. Agama dianggap sebagai sesuatu yang relatif, sehingga jarang dilibatkan dalam pembicaraan publik mengenai pencarian kebenaran universal, seperti ilmu pengetahuan. Media telah lama mengeluarkan teologi dari pembicaraan publik, sehingga pandangan berdasarkan kepercayaan pribadi tidak lagi dibahas. Oleh sebab itu, diskusi di media barat adalah sekuler; agama dan kepercayaan tidak lagi dijadikan dasar pembahasan di ruang publik.
- c. Kritik yang muncul dari badan-badan relijius, baik dari Kristen maupun Islam, yang menganggap bahwa sekularisme Barat semakin berkembang dan merupakan sesuatu yang buruk. Budaya dan tradisi Kristen, sebaliknya, malah bertambah kuat di negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Dengan kata lain, sekularisme adalah bentuk nilai-nilai relijius dan budaya yang berkembang di Barat (Smith, 2008: 3-6).

Beberapa kalangan menarik asal mula sekularisme dari zaman renaissance dan pencerahan, yaitu pada saat munculnya filsafat liberal dan motede sains modern. Pandangan perlunya membebaskan diri dari batasan-batasan agama terhadap kehidupan semakin signifikan. Perbincangan sehari-hari pun telah menghilangkan agama sebagai pokok bahasan di antara masalah-masalah sosial seperti kesehatan, kriminalitas, lingkungan, yang dapat diterangkan dengan ilmu pengetahuan (Smith, 2008: 7-8).

Perkembangan sekularisme ini juga

dilihat sebagai perang budaya, terutama di Amerika. Menurut Smith, Amerika adalah contoh unik dari sekularisme karena perdebatan dalam penyelesaian berbagai masalah publik masih terpengaruh nilai-nilai agama, seperti pandangan tentang hak aborsi dan perlunya teori evolusi Darwin sebagai alternatif terhadap teori *creationist* yang berasal dari alkitab, yaitu bahwa dunia dan isinya diciptakan oleh Tuhan. Akan tetapi Smith menganggap bahwa perdebatan mengenai hal ini hanyalah suatu bentuk pengembangan isu yang diperjuangkan oleh kelompok Evangelis menjadi perdebatan nasional, dan pada dasarnya masyarakat Kristen Amerika telah berkembang menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal rasional dan pengetahuan sekuler seperti teori evolusi (Smith, 2008: 29).

Susan Jacoby dalam bukunya *Freethinkers: The History of American Secularism* menggambarkan sekularisme sebagai paham yang telah merambat pada setiap aspek kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Ia menganggap bahwa sekularisme berkaitan dengan “perang budaya Amerika”, dan menganjurkan pentingnya pembebasan dari efek buruk Kristen terhadap humanisme. Masyarakat perlu dibebaskan dari batasan-batasan agama dan menawarkan humanisme sebagai alternatif untuk hidup lebih baik dengan akal pikiran. Dalam situasi sosial yang sekuler saat ini, masyarakat Amerika telah menerima rasionalitas sebagai penjelasan fenomena dan peristiwa, seperti teori evolusi sebagai alternatif *creationist*. Jacoby juga menekankan perlunya kewaspadaan terhadap pengaruh Gereja yang dapat menghambat perubahan sosial humanis, karena gereja dapat disamakan dengan konservatisme. Hal ini dilihat dari resistensi gereja untuk mendukung hak-hak wanita dan aborsi (dalam Smith, 2008: 26-8).

Fenomena sekularisme di Amerika juga dapat dilihat dari pandangan masyarakat Amerika secara umum bahwa agama adalah sesuatu yang privat, bukan publik, atau dengan kata lain terjadinya privatisasi agama di masyarakat Amerika dibandingkan pada masa berdirinya. Stephen Hart melihat privatisasi agama di Amerika ini dari beberapa fenomena, yaitu:

- a. Agama tanpa gereja. Kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan ibadah agama tanpa keterlibatan langsung dengan

- gereja dan komunitasnya.
- b. Gereja sebagai asosiasi voluntarisme. Pemikiran yang berkembang bahwa gereja hanyalah asosiasi untuk kegiatan sukarela yang tidak berbeda dari institusi amal lainnya. Selain itu, fungsi gereja dalam masyarakat tergantung pada pandangan setiap anggota masyarakat terhadapnya; seberapa besar otoritas dan tugas apa yang didelegasikan oleh masyarakat pada gereja, maka seperti itulah definisi gereja, yang berarti bahwa gereja tidak lagi selalu dianggap sebagai tempat yang suci.
 - c. Tanggung jawab teologi individu. Setiap jemaat bertanggung jawab atas definisinya sendiri tentang kepercayaannya, dan dapat meyakini berbagai variasi kepercayaan.
 - d. Subjektivitas agama. Kecenderungan untuk berpikir bahwa isu agama adalah sesuatu yang subjektif, dan tidak mungkin untuk mendiskusikan isu tersebut. Dalam hal inilah agama dianggap sebagai masalah pribadi, dan setiap orang harus mengikuti kesadarannya sendiri dalam masalah kepercayaan.
 - e. Pemisahan agama dari masalah publik. Gagasan bahwa agama hanya meliputi bagian dalam kehidupan seseorang, ataupun antar personal seperti antar teman dan keluarga, tapi tidak untuk dibahas di luar dari itu ataupun di tengah masyarakat. Pertanyaan bahwa apakah nilai-nilai Kristen membuat perilaku moral lebih baik, hanya berkaitan dengan perilaku individu, tidak perilaku masyarakat atau bahasan sosial. Pemikiran ini bahkan lebih jauh dari konsep pemisahan negara dan agama.
 - f. Berkembangnya "pasar agama". Kecenderungan penganut agama untuk "belanja gereja", yaitu pentingnya menjadi jemaat sebuah gereja atau menyumbang untuk memaksimalkan diri spiritualnya di depan Tuhan. Dalam hal ini, gereja pun berlomba-lomba untuk menarik lebih banyak jemaat dengan berbagai macam program dan ceramah yang menarik (Hart: 1987- 320-1).

Sekularisme di Media Amerika

Menghilangnya topik agama dan kepercayaan spiritual dalam perdebatan publik dapat dilihat dari berita di media. Seperti yang telah dijelaskan di atas, media cenderung sekuler dan tidak membahas pandangan-pandangan agama maupun pemimpin agama sebagai sesuatu yang

penting untuk publik. Agama dan kepercayaan dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak untuk dibahas di forum publik. Walaupun sebagian kecil media di Amerika mempunyai afiliasi dengan kelompok agama dan menjadi corong aspirasi nilai-nilainya, media massa yang besar di Amerika saat ini telah menjadi sekuler dan bebas dari representasi nilai-nilai agama. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya kecurigaan dan alienasi terhadap denominasi dan hierarki agama sejak tahun 1970-an. Pelestarian agama, menurut pandangan umum, tidak lagi merupakan urusan institusi, tetapi individu (Ryan and Switzer, 2009: 103).

Sekularisme media juga terkait dengan perdebatan antara konservatif dan liberal, dalam hal ini antara Kristen konservatif dan Kristen moderat maupun agnostik, mengenai isu sosial dan politik yang memenuhi media Amerika saat ini. Secara garis besar masyarakat Amerika terpecah ke dalam kelompok yang moderat/liberal dan kalangan Kristen konservatif dalam persoalan legalisasi aborsi, hak dan perkawinan homoseksual, serta pendidikan kontrasepsi maupun teori evolusi. Secara umum telah diketahui kecenderungan media untuk memberitakan isu-isu tersebut dari sudut pandang liberal dan moderat, yaitu dukungan terhadap pelaksanaan hal-hal tersebut, yang biasanya justru ditentang oleh kelompok konservatif.

Walaupun terdapat bantahan dari media maupun kelompok liberal terhadap bias liberal media, yang menyatakan bahwa tuduhan tersebut hanya berasal dari kelompok konservatif yang merasa tidak senang dengan pemberitaan, beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa dalam 30 tahun terakhir para jurnalis, terutama yang menduduki posisi tinggi, lebih liberal dari masyarakat Amerika. Media Research Center (MRC), sebuah lembaga penelitian yang memfokuskan penelitian terhadap media, menemukan bahwa jurnalis dan elit media cenderung memilih kandidat berpandangan liberal, menggambarkan posisi mereka sebagai liberal, dan cenderung menyetujui kebijakan politik yang liberal. Jumlah proporsi jurnalis yang mengaku liberal ini lebih besar daripada sebagian besar masyarakat. Hasil penelitian MRC, *Media Bias 101*, menunjukkan bahwa presentasi liberal di media memang mendapat proporsi lebih besar, dan hal ini dihasilkan dari penelitian oleh organisasi media, kalangan akademis dan profesional, bukan oleh kalangan konservatif (*Media Bias*

Individualisme dan Liberalisme...

101, 2009: 2).

Berbagai penelitian juga menunjukkan sekularisme media sebagai salah satu faktor dalam bias liberal media. Penelitian Lichter, Rothman, dan Lichter pada tahun 1981 merupakan rujukan klasik yang menunjukkan kecenderungan liberal para pelaku media. Dalam buku *The Media Elite*, mereka menjabarkan hasil survey yang menyebutkan setengah dari kelompok elit media menghindari afiliasi dengan organisasi keagamaan. Sisanya, 14 persen mengaku sebagai Yahudi, 20 persen mengakui identitas Protestan, dan satu dari delapan orang mengaku Katolik. Hanya delapan persen dari mereka yang ke gereja atau *synagogue* setiap minggu, dan 86 persen jarang atau tidak pernah menghadiri acara keagamaan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar elit media berasal dari kota besar dan dibesarkan dalam keluarga menengah ke atas yang terpelajar di antara lingkungan cosmopolitan, dan jauh dari nilai-nilai tradisi yang kental terlihat di kota-kota di tengah Amerika (Lichter, Rothman & Lichter, 1986: 22-3).

Hasil yang menunjukkan bias liberal media diikuti oleh penelitian-penelitian lain, bahkan oleh survey yang dilakukan oleh media itu sendiri. Sebuah survey dari L.A. Times pada tahun 1985 menunjukkan bahwa sebagian besar reporter mempunyai pandangan liberal dalam berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial. Sebanyak 82 persen mengatakan bahwa mereka menyetujui legalisasi aborsi, 80 persen menentang peningkatan anggaran pertahanan, dan 78 persen mendukung perlunya kontrol peredaran senjata (<http://www.mediaresearch.org/realitycheck/2001/20010814.asp>, para 8). Dari isu-isu yang diteliti ini, terlihat bahwa dukungan terhadap legalisasi aborsi merupakan pandangan yang moderat dan cenderung liberal apabila dibandingkan dengan nilai-nilai keagamaan yang menentang aborsi.

Tudingan liberalisme media ini bahkan lebih keras muncul dari kelompok konservatif ataupun sebagian besar pendukung partai Republik. David Limbaugh menyatakan bahwa kampanye perlunya hak-hak homoseksual dan pengakuan perkawinan homoseksual serta legalisasi aborsi di media merupakan “serangan” terhadap nilai-nilai Kristen tradisional masyarakat Amerika (2003: 64). S. E. Cupp, seorang pendukung Republik yang mengaku ateis bahkan memberikan interpretasi

lebih dalam lagi dengan menunjukkan bias liberal media yang terlihat dari pemberitaan media yang sering menghina kebijakan George W. Bush yang konservatif, pengidolaan terhadap selebriti dan artis yang tidak berkaitan dengan panutan keagamaan, dengan kata lain “idola sekuler” (2010: 13-4), mendorong hak-hak homoseksual dan legalitas perkawinan gay, serta meremehkan diloloskannya Prop 8 di California, yaitu undang-undang yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian menentang perkawinan homoseksual (Cupp, 2010: 40). Ia menyayangkan sikap media tersebut karena belum tentu sesuai dengan opini masyarakat yang mayoritas Kristen, yaitu hingga 80%, sehingga suara masyarakat beragama yang mayoritas tersebut jarang direpresentasi oleh media.

Selain itu, Cupp menganggap “serangan” media terhadap nilai-nilai Kristen sebagai kecenderungan buruk liberal yang tidak objektif terhadap pandangan-pandangan lain yang bertentangan dengan liberalisme. Hal ini merupakan salah satu kritik besar terhadap liberalisme yang seharusnya objektif dan dapat memfasilitasi pandangan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Ia menuding bahwa objektivitas media hanya sebatas hal-hal yang masih sejalan dengan ideologi media. Nilai-nilai lain seperti toleransi beragama, nilai-nilai Judeo-Christian yang membentuk Amerika, serta perilaku bermoral yang muncul dari nilai-nilai agama tidak diperlukan ketika berhadapan dengan sekularisme (Cupp, 2010: 4).

Sekularisme di Amerika adalah salah satu cara untuk menjaga toleransi beragama dan menghindari konflik. Proses sekularisasi memang terjadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan modernisasi, namun juga diikuti dengan paham sekularisme di tengah masyarakat demokrasi liberal yang mengarah pada privatisasi agama. Nilai-nilai dan kebenaran agama sudah menjadi ranah pribadi dan tidak patut dibahas di tengah masyarakat, serta tidak boleh diatur oleh pemerintah. Amerika telah memulai tradisi ini dari awal terbentuknya, dan hingga saat ini merupakan karakteristik yang cukup jelas terlihat dalam masyarakat Amerika.

Simpulan

Peran media dalam masyarakat sangat sentral karena merepresentasikan ruang publik

antara negara dan warga negara dan sebagai fasilitas yang menampung wacana permasalahan bersama. Peran penting media ini terutama dilihat dalam sistem demokrasi liberal yang menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi. Media merupakan lambang dan corong kebebasan serta merupakan bukti bahwa kebebasan individu dijamin dalam demokrasi. Maka itu negara demokrasi liberal menyebabkan industri media tumbuh subur, begitupun ideologi yang diusungnya tidak dapat dikekang dalam pertarungan wacana yang bebas.

Tidaklah mengherankan bahwa media tumbuh paling pesat di negara Amerika yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Media yang di banyak negara berawal dari corong politik kelompok tertentu ataupun pemerintah, di Amerika banyak dimiliki pengusaha independen dan hanya sedikit yang berafiliasi dengan kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, penyebaran informasi menjadi industri yang berkembang pesat di Amerika, dan hal ini menyebabkan media Amerika menjadi acuan dan bahasan menarik bagi media lain di seluruh dunia.

Kebebasan media Amerika terlihat dari pemberitaan yang lebih bebas dan ekspresif dalam menyuarakan pendapat dan memilih wacana, walaupun tentu bukan tanpa aturan. Perebutan wacana media menyebabkan mereka harus berlandaskan pada visi dan misi yang jelas dalam mengusung wacana. Dengan kata lain, media juga mempunyai ideologi sendiri yang akan membimbing langkah media dalam jangka panjang. Namun sangat wajar bahwa media menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan hak individu sebagai hal utama yang harus diperjuangkan. Media Amerika dapat dikatakan media yang paling liberal dan bebas dalam mengekspresikan ideologinya.

Akan tetapi, kebebasan dan liberalisme ini menimbulkan tuduhan bahwa sebagian besar media Amerika, terutama yang berpengaruh secara nasional, bias dalam pemberitaan, ketika media cenderung memberitakan dengan menguntungkan pihak liberal kiri atau Partai Demokrat dalam pemberitaan, yang kerap mendukung program dan kebijakan yang lepas dari nilai-nilai agama seperti legalisasi aborsi dan perkawinan homoseksual. Sebagian besar media bahkan memilih untuk mendukung isu-isu yang terbebas dari nilai-nilai agama tertentu, dan menghindari representasi nilai-

nilai keagamaan tertentu. Dengan demikian, bagi masyarakat yang berada di luar Amerika, pemisahan kehidupan publik dan agama di masyarakat Amerika sangat tercermin dari pemberitaan yang sekuler di media yang juga tercermin dalam pandangan politik dan liberal pelaku media di Amerika.

Daftar Rujukan

- Berkes, Niyazi. 1998. **The Development of Secularism in Turkey**. New York: Routledge.
- Berlin, Isaiah. 1969. **Empat Esai Kebebasan**. Trans. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004. Trans. of *Four Essays on Liberty*.
- Cupp, S. E. 2010. **Losing our Religion: The Liberal Media's Attack on Christianity**. New York: Threshold Editions.
- Eisgruber, Christopher L., and Lawrence G. Sager. 2007. **Religious Freedom and The Constitution**. Cambridge: Harvard University Press.
- Hamburger, Philip. 2002. **Separation of Church and State**. Cambridge: Harvard University Press.
- Hart, Stephen. 1987. *Privatization in American Religion and Society*. **Sociological Analysis 47: 4 (Winter, 1987), pp. 319-334**.
- Lichter, Robert S., Stanley Rothman, and Linda S. Lichter. 1986. **The Media Elite: America's New Powerbrokers**. New York: Communication Arts Books.
- Limbaugh, David. 2003. **Persecution: How Liberals are Waging War Against Christianity**. Washington DC: Regnery Publishing, Inc.
- Rawls, John. 1971. **A Theory of Justice**. Cambridge: Harvard University Press.
- Ryan, Michael, and Les Switzer. 2009. **God in the Corridors of Power: Christian Conservatives, the Media, and Politics in America**. Santa Barbara: ABC CLIO, LLC.
- Shapiro, Ian. 1986. **Evolusi Hak dalam Teori Liberal**. Trans. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Trans. of *The Evolution of Rights in Liberal Theory*.

Individualisme dan Liberalisme...

- Smith, Graeme. 2008. **A Short History of Secularism**. London: I.B. Tauris.
- Trigg, Roger. 2007. **Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized?** Oxford: Oxford University Press.
- Bader, Veit. 2003. *Religion and States: A New Typology and a Plea for Non-Constitutional Pluralism*. **Ethical Theory and Moral Practice 6: 1**, Religious Pluralism, Politics, and the State (March 2003), pp. 55-91. 14 April 2010<<http://www.jstor.org/stable/27504262>>
- Esbeck, Carl. 1985. *Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought*. **Brigham Young University Law Review**. 1985. 25 September 2010<<http://lawreview.byu.edu/archives/1986/2/esb.pdf>>
- Media Bias 101, www.mediaaresearch.org, Oktober 2009. 2 Maret 2010 <<http://www.mrc.org/static/uploads/MediaBias101.pdf>>
- Yinger, J. Milton. 1967. *Pluralism, Religion, and Secularism*. **Journal for the Scientific Study of Religion 6: 1** (Spring, 1967): pp. 17-28. 23 Agustus 2010<<http://www.jstor.org/stable/1384190>>